

ABSTRAK

PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH HASIL PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI (Studi di Kawasan Industri Panjang)

**Oleh :
Ahmad Hirliansyah**

Penegakan hukum lingkungan hidup salah satunya adalah dapat berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu institusi lingkungan hidup yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara oleh beberapa industri di Kota Bandar Lampung ternyata masih dijumpai hal-hal yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasannya tersebut .

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPPLH Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri dilakukan dengan cara sebagai memberlakukan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara LB3 bagi pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3. Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan BPPLH Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur profesional yang dimiliki oleh BPPLH

Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan. Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan.

Disarankan kepada BPPLH Kota Bandar Lampung untuk memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Limbah, Batubara.